

## Kata Pengantar

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik.

Sesuai dengan Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut Tap MPR RI dan Undang-Undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Dalam perkembangannya, telah diterbitkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, telah disusun Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian No 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode 2016. Laporan ini diarahkan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi jajaran Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III untuk meningkatkan kinerja satuan unit dimasa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Pengembangan Wilayah  
Industri III

Ignatius Warsito

---

## RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIP Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III Tahun 2016 disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) menetapkan sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Kunci bagi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III pada tahun tertentu. Sasaran tersebut mempunyai target masing-masing, dimana pelaksanaannya didukung oleh anggaran yang tersedia di dalam DIPA.

Total jumlah DIPA yang diterima oleh Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III untuk tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 38.850.000.000,-, namun terkena pemotongan anggaran I sehingga menjadi Rp 36.759.368.000,-. Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, anggaran Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III terkena pemotongan sehingga menjadi Rp. 19.819.531.270,- dan berhasil direalisasikan sampai akhir tahun sebesar Rp 19.746.314.517,- (99.6%) dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 kegiatan.

Berdasarkan Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan, rata-rata nilai capaian kinerja adalah sebesar 71,82 %. Nilai capaian tersebut telah menunjukkan bahwa program kerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan capaian IKU yang ditargetkan.

Untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung sasaran yang telah ditetapkan dan pelayanan bagi *stakeholder* terkait, perlu kiranya dilakukan perbaikan terutama melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III.

Dari sisi keuangan diharapkan pula adanya pembenahan dalam upaya pencairan dana yang selama ini mengalami berbagai hambatan serta bagi penanggung jawab kegiatan lebih meningkatkan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

---

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	vi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
B. Struktur Organisasi .....	2
C. Latar Belakang Kegiatan/Program .....	3
D. Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III.....	4
1. Visi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III .....	5
2. Misi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III .....	5
3. Tujuan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III.....	5
4. Sasaran Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III .....	6
5. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PWI III .....	8

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

A. Perencanaan Kinerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III .....	10
C. Rencana Anggaran Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III .....	12

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

1. Kinerja Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Direktorat PWI III.....	13
2. Kinerja Keuangan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III.....	44

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	48

### **LAMPIRAN**

---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III .....	9
Tabel 2.	Pagu Anggaran Direktorat Pengembangan Wilayah III Tahun 2016 .....	12
Tabel 3.	Target dan Realisasi Tahun 2016 IKU 1,2,3 dari Meningkatnya Penyebaran dan Pemerataan Industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara .....	15
Tabel 4.	Target dan Realisasi Tahun 2016 IKU 4,5,6 dari Meningkatnya Penyebaran dan Pemerataan Industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara .....	16
Tabel 5.	Statistik Perusahaan Industri Besar Sedang di Bali Tahun 2010-2013.....	17
Tabel 6.	Target dan Realisasi Tahun 2016 IKU 7,8,9 dari Meningkatnya Penyebaran dan Pemerataan Industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara .....	19
Tabel 7.	Target dan Realisasi Tahun 2016 IKU 10,11 dari Meningkatnya Penyebaran dan Pemerataan Industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara .....	21
Tabel 8.	Lima Besar Lokasi Realisasi Investasi Triwulan III tahun 2016 .....	22
Tabel 9.	Target dan Realisasi Tahun 2016 IKU 12,13,14 dari Meningkatnya Penyebaran dan Pemerataan Industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara .....	22
Tabel 10.	Target dan Realisasi IKU dari Tumbuh dan Berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ....	27
Tabel 11.	Data Review KPI Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III Tahun 2016 .....	32
Tabel 12.	Target dan Realisasi IKU dari Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara .....	34
Tabel 13.	Target dan Realisasi IKU dari Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara .....	38

---

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU dari Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Eselon II .....	43
Tabel 15. Pagu Anggaran dan Realisasi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III Tahun 2016 (tanpa blokir) .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Wilayah III.....	2
Gambar 2. Kontribusi Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara terhadap PDB Nasional pada Triwulan I 2010 – Triwulan III 2016 .....	25
Gambar 3. Pertumbuhan PDB Nasional Industri Manufaktur Non Migas 2009-2016 Triwulan III (%) .....	26

---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III

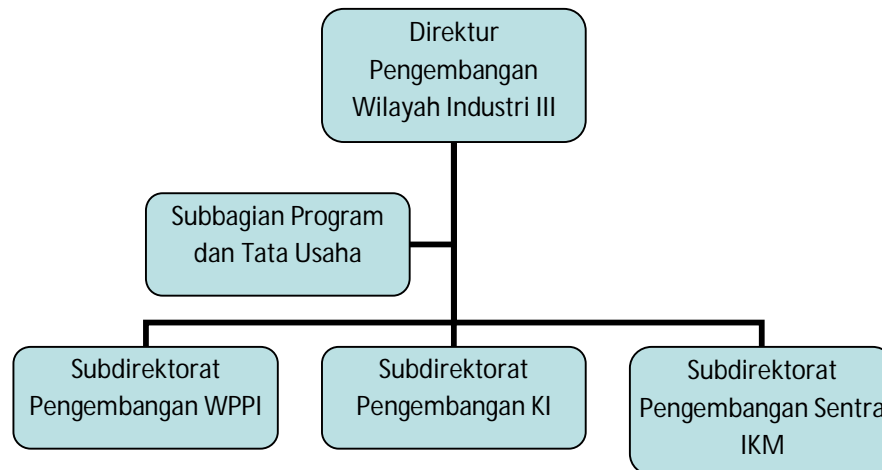
Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II mengalami perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III, yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, dan perizinan kawasan industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri dan perizinan kawasan industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
- b. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
- c. Fasilitas penyediaan infrastruktur industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
- d. Pengembangan kerja sama teknis;
- e. Promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
- f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perizinan kawasan industri;
- g. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perizinan kawasan industri; dan
- h. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

## B. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti pada bagian A diatas, unit organisasi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III dibagi menjadi 3 (tiga) unit Eselon III, dengan struktur seperti pada Gambar 1.



**Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III**

Tugas pokok masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

### 1. Subdirektorat Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Subdirektorat Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, penyiapan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, penyiapan pengembangan kerja sama teknis dan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

### 2. Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, dan perizinan kawasan industri, penyiapan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi kawasan industri wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.



### 3. Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, penyiapan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

#### C. Latar Belakang Kegiatan/Program

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, mengembangkan industri kecil dan menengah, mewujudkan struktur industri yang sehat dan berkeadilan, serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Jawa, khususnya, dalam konteks tupoksi Wilayah III, ke Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Salah satu misi pembangunan jangka panjang yang terkait dengan pengembangan wilayah adalah mewujudkan pemerataan dan penyebaran pembangunan industri berlandaskan pada keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, diharapkan juga dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, keunggulan komparatif tadi menjadi keunggulan kompetitif. Tentu saja ini memerlukan intervensi dari Pemerintah. Pengembangan wilayah tersebut diarahkan untuk memantapkan penataan pengembangan kewilayahan industri dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mencakup pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, penguatan daya saing daerah dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Hal tersebut diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. UU tersebut secara eksplisit mengamanatkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Arah pembangunan industri kewilayahan, berdasarkan pada amanah UU tersebut, pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan nilai tambah industri di daerah. Dengan berkembangnya sektor industri di daerah maka hal ini akan memberikan dampak yang positif bagi kemajuan daerah. Beberapa efek langsung akibat pertumbuhan industri adalah: penyerapan tenaga kerja secara masif, peningkatan

investasi dan kredit yang akan menggerakkan sektor ril, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat lokal. Konsep dasar pengembangan industri kewilayahan harus dikaitkan dengan aspek utamanya, yaitu: rencana tata ruang wilayah dan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional, dan, sekali lagi, peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah.

Wilayah Jawa dan Bali relatif lebih maju dan berkembang dibanding kawasan Indonesia lainnya, namun seiring dengan perubahan lingkungan strategis dan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional maka wilayah Jawa dan Bali akan menghadapi isu strategis antara lain menghadapi jumlah penduduk perkotaan, struktur ekonomi bergeser pada peningkatan sektor jasa dan industri berbasis teknologi tinggi dan pengetahuan serta ramah lingkungan. Wilayah Jawa dan Bali difokuskan pada penataan industri yang sudah ada serta pengembangan industri kecil dan menengah.

Wilayah Nusa Tenggara memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun pemanfaatan dan pengelolaannya belum optimal sehingga perlu peran serta Pemerintah dalam mewujudkan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.

Pada dasarnya pembangunan sektor industri di daerah diserahkan kepada peran aktif pemerintah daerah, sektor swasta, sementara pemerintah pusat lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang mendorong dan memberikan berbagai kemudahan bagi aktivitas-aktivitas sektor swasta.

#### **D. Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III**

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis) dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III sebagai unit pada Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan suatu dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai rujukan untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan perwilayahan industri di Jawa, Bali dan Nusa

Tenggara. Dengan adanya perencanaan terpadu dan adanya keselarasan implementasi program-program, yang diiringi oleh proses evaluasi dan pengendalian pada kurun waktu 2015-2019, diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III, selain itu ini juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian sasaran dan kinerja.

### **1. Visi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III**

Visi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III adalah:

**“Terwujudnya Industri Unggulan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang Berdaya Saing Global”.**

### **2. Misi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III mengemban misi sebagai berikut:

- Peningkatan daya saing industri Jawa, Bali dan Nusa Tenggara melalui fasilitasi, regulasi, dan implementasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;
- Memfasilitasi pembangunan industri daerah berlandaskan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana industri guna mendukung perwilayahan industri.

### **3. Tujuan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III**

Tujuan pengembangan perwilayahan industri Direktorat PWI III adalah terwujudnya percepatan pembangunan industri dengan berkembangnya WPPI, KPI, KI, dan Sentra IKM. Indikator dari tujuan tersebut adalah :

- 1) Persentase jumlah unit usaha besar sedang di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara terhadap populasi industri besar sedang nasional;
- 2) Persentase nilai tambah sektor industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara terhadap nilai tambah sektor industri nasional.

#### 4. Sasaran Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder*), perspektif pelaksanaan tugas pokok, dan perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini.

##### **Sasaran Strategis I:**

*Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.*

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

- 1) Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional
- 2) Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Bali terhadap nilai tambah sektor industri nasional
- 3) Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Nusa Tenggara terhadap nilai sektor industri nasional
- 4) Meningkatnya unit usaha besar sedang di wilayah Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional
- 5) Meningkatnya unit usaha besar sedang di wilayah Bali terhadap total populasi industri besar sedang nasional
- 6) Meningkatnya unit usaha besar sedang di wilayah Nusa Tenggara terhadap total populasi industri besar sedang nasional
- 7) Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah Jawa
- 8) Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah Bali
- 9) Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah Nusa Tenggara
- 10) Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di wilayah Jawa
- 11) Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di wilayah Bali dan Nusa Tenggara
- 12) Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Jawa
- 13) Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Bali

14) Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Nusa Tenggara

### **Sasaran Strategis II:**

*Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara*

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi dalam Wilayah Pengembangan Industri. WPPI disusun berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya potensi sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur fisik dan non fisik, memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam, memiliki potensi sumber daya air industri, kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi dan lain-lain.

Sementara itu, Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kawasan peruntukan industri yang disusun dalam RTRW Kab/Kota tersebut, harus memenuhi kriteria kebutuhan industri.

Berkembangnya WPPI diindikasikan dengan terbangunnya infrastruktur pendukung di dalam WPPI. Sedangkan berkembangnya KPI diindikasikan dengan tingkat kesesuaian lahan yang tersedia dengan kriteria kebutuhan industri.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1. Tersusunnya kajian pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;
2. Terlaksananya review Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

### **Sasaran Strategis III:**

*Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.*

Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Pulau Jawa memiliki jumlah kawasan industri paling banyak di banding pulau-pulau lain di Indonesia. Pengembangan kawasan industri di Pulau Jawa dilakukan melalui pembinaan dan penataan yang diarahkan menjadi kawasan industri yang berwawasan lingkungan.

Adanya kewajiban kegiatan industri berada di dalam kawasan industri atau minimal berada di KPI (jika Kawasan Industri penuh atau belum ada) memberikan dorongan untuk kegiatan industri berada di dalam kawasan. Untuk mendukung hal tersebut perlu disiapkan kawasan industri yang memadai sebagai tampungan relokasi dan munculnya kegiatan industri baru.

Bentuk dukungan berupa fasilitasi masterplan, Feasibility Study (FS), Detail Engineering Desain (DED) kawasan industri. Disamping itu juga penataan kawasan-kawasan industri eksisting di Pulau Jawa. Pembangunan kawasan industri baru dapat dilakukan baik oleh swasta maupun pemerintah. Kawasan industri yang dibangun oleh Pemerintah diprioritaskan untuk berada di luar Pulau Jawa. Kawasan industri yang dibangun berada di daerah-daerah yang telah memiliki rencana pengembangan kawasan industri.

Berkembangnya kawasan industri diindikasikan dengan terbangunnya infrastruktur dasar dalam kawasan industri. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan

#### **Sasaran Strategis IV:**

*Tumbuh dan berkembangnya sentra industri kecil dan menengah di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara*

Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.

Berdasarkan kondisi saat ini, banyak potensi di daerah yang dapat digunakan untuk penumbuhan IKM yang belum dimanfaatkan. Di samping itu, pada beberapa daerah sudah tumbuh sejumlah IKM dalam kondisi tersebar, sehingga pembinaan yang dilakukan kurang efektif, atau telah berbentuk sentra namun belum optimal.

Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Pengembangan Sentra IKM perlu diarahkan untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan

WPPI, maupun Sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah :

- 1) Terfasilitasinya sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan
- 2) Terbangunnya sentra IKM di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

#### **Sasaran Strategis V:**

##### *Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri*

Pembangunan infrastruktur industri dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif. Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar Kawasan Peruntukan Industri, meliputi energi dan lahan kawasan industri. Penyediaan infrastruktur industri dilakukan melalui koordinasi antar kementerian/lembaga, pembangunan dan pengembangan infrastruktur industri, dan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri. Sasaran ini diindikasikan melalui:

- 1) Jumlah sentra IKM yang dibangun dan beroperasi

#### **Sasaran Strategis VI:**

##### *Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.*

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah:

- 1) Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja.

#### **Sasaran Strategis VII:**

##### *Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran.*

Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran di lingkungan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkeadilan. Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah

- 1) Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan.

### **Sasaran Strategis VIII:**

*Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.*

Pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut Tap MPR RI dan Undang-Undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah:

- 1). Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan;
- 2). Nilai SAKIP Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III.

### **Sasaran Strategis IX:**

*Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan.*

Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

- 1) tingkat kualitas laporan keuangan.

## **5. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III**

Arah kebijakan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III adalah berupaya semaksimal mungkin untuk menarik investasi industri dengan menyediakan lokus bagi industri tersebut dimana seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan telah tersedia. Setelah itu baru fokus pada kebijakan yang mendorong pertumbuhan populasi industri dan



peningkatan produktivitasnya. Uraian rinci tentang arah kebijakan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Perwilayahan Industri di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara: (a) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri; (b) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; (c) Pembangunan Kawasan Industri; dan (d) Pengembangan Sentra IKM. Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah:
  - a. Pengembangan 5(lima) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di 4 Provinsi. Untuk Provinsi DKI. Jakarta, DI. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tidak memiliki WPPI, tetapi disiapkan sebagai pendukung WPPI.

**Tabel 3.1. Daerah-Daerah yang Ditetapkan sebagai WPPI**

No	Lokasi Kabupaten/Kota	Provinsi
1	Cirebon-Indramayu-Majalengka	Jawa Barat
2	Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang	Jawa Barat
3	Kendal-Semarang-Demak	Jawa Tengah
4	Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan	Jawa Timur
5	Cilegon-Serang-Tangerang	Banten

- b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dengan mendorong industri di setiap Kabupaten/Kota dibangun dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Pengembangan KPI dilakukan dengan mengacu pada RTRW masing-masing Kabupaten/Kota. KPI adalah tempat berlokasinta kawasan industri dan industri-industri di daerah yang tidak memiliki kawasan industri. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak termasuk dalam WPPI dan tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, pengembangan industrinya dapat dilakukan sepanjang berada di dalam KPI.
  - c. Pengembangan Kawasan Industri (KI). Adanya kewajiban kegiatan industri berada di dalam kawasan industri atau minimal berada di KPI memberikan dorongan untuk kegiatan industri berada di dalam kawasan. Untuk mendukung hal tersebut perlu disiapkan kawasan industri yang memadai sebagai tampungan relokasi dan munculnya kegiatan industri. Bentuk dukungan berupa fasilitasi masterplan, *feasibility study*, serta *detailed engineering design*.

- d. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM). Pengembangan sentra IKM dilakukan di setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, untuk menghasilkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI III**

Perencanaan kinerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III ini disusun melalui 2 (dua) tahapan perencanaan, yaitu tahapan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 dan tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016. Kedua dokumen tersebut disusun dan ditetapkan pada awal tahun anggaran 2016.

Dokumen penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2016 disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III tahun 2015 sebagaimana diuraikan dalam dokumen LAKIP Direktorat tahun 2015 dan beberapa penyesuaian dengan ketersediaan anggaran yang disetujui dan tertuang dalam DIPA tahun 2016. Hasil evaluasi dan beberapa penyesuaian ini berdampak pada sasaran strategis, indikator kinerja maupun target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Penyesuaian ini didasari dengan pertimbangan ketersediaan data dukung pengukuran indikator kinerja, rasionalitas ketercapaian target sasaran dan indikator kinerja serta kesesuaian target dengan ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia, anggaran maupun sarana lain. Sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016 dan ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III Tahun 2016 dengan penetapan anggaran sebagaimana dalam DIPA Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana pada tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III Tahun 2016**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di Wilayah Jawa terhadap nilai tambah sektor industri	Persen	71,94%
		Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Bali terhadap nilai tambah sektor industri	Persen	0.55%
		Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Nusa Tenggara terhadap nilai tambah sektor industri nasional	Persen	0.18%
		Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di wilayah Jawa terhadap total populasi industri besar sedang	Persen	78.59%
		Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di wilayah Bali terhadap total populasi industri besar sedang	Persen	1.61%
		Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di wilayah Nusa Tenggara terhadap total populasi industri besar sedang	Persen	0.98%
		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah Jawa	Persen	5.63%
		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah Bali	Persen	6.25%
		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah Nusa Tenggara	Persen	6.55%

		Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di wilayah Jawa	Persen	67.51%
		Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di wilayah Bali	Persen	0.15%
		Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di wilayah Nusa Tenggara	Persen	26.05%
		Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Jawa	Persen	26.05%
		Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Bali	Persen	9.10%
		Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Nusa Tenggara	Persen	2.98%
2	Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	Tersusunnya kajian pengembangan WPPI	Dokumen	6
		Terlaksananya review Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Jawa	Daerah	26
3	Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	Terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan	KI	3 KI
4	Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	Terfasilitasinya sentra IKM dalam penyusunan rencana Pembangunan	Sentra	4 Sentra
		Terbangunnya sentra IKM di wilayah III	Sentra	1

---

5	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	Jumlah sentra IKM yang dibangun dan beroperasi	Sentra	1
---	--	--	--------	---

## B. RENCANA ANGGARAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI III

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III Tahun 2016 dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan pentargetan yang telah ditetapkan pada tahun 2016, didukung dengan pembiayaan APBN sebesar Rp.36.759.368.000,- yang meliputi program utama dan program penunjang. Namun setelah adanya pemotongan anggaran, nominal pagu menurun hingga akhir tahun menjadi sebesar Rp. 19.746.314.500. Secara lengkap pagu anggaran awal tersebut disajikan dalam tabel 2.

**Tabel 2.**

### **Pagu Anggaran Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>Pagu 2016 (Rp.)</b>
1	Dokumen Perencanaan dan Bahan Koordinasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah III (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	7.250.820.000
2	Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Wilayah III (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	8.288.196.000
3	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri Prioritas Lainnya Wilayah III (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	4.332.350.000
4	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sentra IKM di Wilayah III (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	3.023.000.000
5	Sentra IKM Wilayah III (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	10.993.002.000
6	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Usaha dan Kerjasama Pengembangan Perwilayahan Industri	1.877.000.000
7	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Eselon II	995.000.000
<b>Total Pagu Anggaran</b>		<b>36.759.368.000</b>

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III tahun 2016 merupakan pencapaian kinerja dalam melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Capaian kinerja ini bukan hanya menguraikan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai kontrak kinerja Direktur Pengembangan Wilayah Industri III, namun juga menguraikan capaian kinerja lain, yaitu kinerja program Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III, dan kinerja keuangan.

Penilaian atas pelaksanaan tugas Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Analisis pencapaian dilengkapi dengan pembandingan capaian dengan tahun sebelumnya serta kinerja lainnya. Namun terdapat beberapa sasaran strategis maupun indikator kinerja utama yang tidak dapat diperbandingkan. Hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak ditetapkan sebagai sasaran strategis atau indikator kinerja utama yang sama, serta dikarenakan ketdaktersediaan data.

### **1. Kinerja Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III**

Sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III mencakup 4 sasaran strategi, 14 indikator kinerja utama (IKU) dan 5 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa pada sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III masih mengacu pada Renstra 2015-2019. Data capaian kinerja yang disajikan dalam laopran kinerja tahun 2016 ini dimungkinkan adanya perbedaan penyajian angka capaian dan data kinerja pada tahun-tahun sebelumnya karena memang terjadi pembaharuan data berdasarkan data pembaharuan dari sumber yang berkompeten seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan unit kerja Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).



**a. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama :

- 1) Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Jawa terhadap nilai tambah sektor industri
- 2) Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Bali terhadap nilai tambah sektor industri
- 3) Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Nusa Tenggara terhadap nilai tambah sektor industri
- 4) Meningkatnya unit usaha besar sedang di wilayah Jawa terhadap total populasi industri besar sedang
- 5) Meningkatnya unit usaha besar sedang di wilayah Bali terhadap total populasi industri besar sedang
- 6) Meningkatnya unit usaha besar sedang di wilayah Nusa Tenggara terhadap total populasi industri besar sedang
- 7) Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah Jawa
- 8) Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah Bali
- 9) Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah Nusa Tenggara
- 10) Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di wilayah Jawa
- 11) Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di wilayah Bali dan Nusa Tenggara
- 12) Meningkatnya *share* sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Jawa
- 13) Meningkatnya *share* sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Bali
- 14) Meningkatnya *share* sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Nusa Tenggara

Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara terhadap nilai tambah sektor industri, diukur melalui perhitungan besarnya output dikurangi besarnya input (biaya antara) sektor industri di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Output adalah nilai keluaran yang dihasilkan dari proses kegiatan industri, sedangkan input atau biaya antara adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi.

Meningkatnya unit usaha besar sedang di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara terhadap total populasi industri besar sedang, diukur melalui perhitungan besaran persentase unit usaha besar sedang di wilayah III terhadap total populasi industri besar sedang nasional.

Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, diukur melalui perhitungan besaran persentase PDRB sektor industri non migas tahun 2016 dikurangi PDRB sektor industri non-migas tahun sebelumnya dibanding PDRB sektor industri non-migas tahun sebelumnya di masing-masing wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, diukur melalui perhitungan besaran persentase investasi sektor industri non-migas terhadap total investasi industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Meningkatnya share sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, diukur melalui perhitungan besaran persentase PDRB sektor industri non migas di Jawa, Bali atau Nusa Tenggara dibanding total PDRB sektor industri non-migas nasional.

**Tabel 3.**

**Target dan Realisasi Tahun 2016 dari Meningkatnya Penyebaran dan Pemerataan Industri di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

IKU	2015			2016		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Jawa terhadap nilai tambah sektor industri	72.27	71.03	98.28	71,94	71,77	99,76
Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Bali terhadap nilai tambah sektor industri	0.55	0.40	72.73	0,55	0,42	76,36
Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Nusa Tenggara terhadap nilai tambah sektor industri	-	-	-	0,18	0,15	83,33
Meningkatnya unit usaha besar sedang di wilayah Jawa terhadap total populasi industri besar sedang	80.66	80.34	99.6	78,59	82,90	105,48
Meningkatnya unit usaha besar sedang di wilayah Bali terhadap total populasi industri besar sedang	1.54	1.47	95.45	1,61	1.32	81.99

Meningkatnya unit usaha besar sedang di wilayah Nusa Tenggara terhadap total populasi industri besar sedang	-	-	-	0,98	0.69	70.41
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah Jawa	6.97	5.87	84.22	5,63	4.85	86.15
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah Bali	7.80	8.88	113.85	6,25	7.13	114.08
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah Nusa Tenggara	-	-	-	6.55	3.96	60.46
Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di wilayah Jawa	68.91	69.52	100.89	67.51	68.51	101.48
Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di wilayah Bali dan Nusa Tenggara	0.15	0.89	593.33	0.15	0.15	100
Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Jawa	25.35	29.09	114.75	26.05	31.00	119.00
Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Bali	8.85	6.38	72.09	9.10	7.0	76.92
Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Nusa Tenggara	-	-	-	2.98	3	100.67

Pencapaian target IKU dari sasaran meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dari tahun 2015 sampai tahun 2016 cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan capaian tersebut disebabkan antara lain karena penurunan beberapa target, khususnya di wilayah Jawa, karena penyebaran pemerataan pembangunan industri diarahkan ke luar Pulau Jawa. Sementara itu, pada tahun 2015 belum ditetapkan target indikator untuk wilayah Nusa Tenggara karena wilayah tersebut belum termasuk ke dalam ruang lingkup tupoksi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III. Pembahasan detail mengenai masing-masing indikator akan dibahas lebih lanjut.

Tabel 4.

**Target dan Realisasi IKU Peningkatan Nilai Tambah dari Meningkatnya Penyebaran dan Pemerataan Industri di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

IKU	2015			2016		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Jawa terhadap nilai tambah sektor industri	72.27	71.03	98.28	71,94	71,77	99,76
Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Bali terhadap nilai tambah sektor industri	0.55	0.40	72.73	0,55	0,42	76,36
Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Nusa Tenggara terhadap nilai tambah sektor industri	-	-	-	0,18	0,15	83,33

Realisasi kontribusi nilai tambah sektor industri lebih rendah dibanding target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 71,77%, namun nilai realisasi tersebut lebih tinggi dibanding realisasi pada tahun 2015. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, namun cukup bagus ditengah perlambatan perekonomian global.

Kontribusi nilai tambah sektor industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dihitung dari melalui perhitungan besarnya output dikurangi besarnya input (termasuk biaya antara) sektor industri di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Nilai tambah tersebut menggambarkan tingkat kemampuan menghasilkan pendapatan di wilayah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tambah antara lain bahan baku, tenaga kerja, logistik, sewa tanah, penyusutan dan pajak tidak langsung dan lain-lain.

Untuk meningkatkan kontribusi nilai tambah sektor industri diperlukan kebijakan yang riil dari pemerintah untuk lebih meningkatkan pertumbuhan sektor industri, seperti kemudahan investasi, pemberian insentif pajak yang jelas, kebijakan tenaga kerja yang tidak kaku, serta akses ke energi yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan subsektor industri non migas lainnya sekaligus untuk menjadikan industri manufaktur sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III turut serta dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara melalui

program dan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Penyusunan kajian kebutuhan infrastruktur dalam WPPI di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur (yang meliputi infrastruktur air, energi, sumber daya manusia, teknologi, transportasi dan logistik) serta kajian identifikasi potensi pengembangan WPPI di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kajian kebutuhan tersebut di atas diharapkan mampu menjadi acuan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III dan Kementerian/Lembaga lain untuk merencanakan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung industri, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu mempengaruhi kontribusi sektor industri terhadap PDRB di daerah.
2. Pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Jawa. Strategi pembangunan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan WPPI yang berbasis keunggulan yang dimiliki daerah diantaranya potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia industri, potensi sumber daya teknologi dan inovasi.

**Tabel 5.**

**Target dan Realisasi IKU Peningkatan Unit Usaha Besar Sedang dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

IKU	2015			2016		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya unit usaha besar sedang di wilayah Jawa terhadap total populasi industri besar sedang	80.66	80.34	99.6	78,59	82,90	105,48
Meningkatnya unit usaha besar sedang di wilayah Bali terhadap total populasi industri besar sedang	1.54	1.47	95.45	1,61	1.32	81.99
Meningkatnya unit usaha besar sedang di wilayah Nusa Tenggara terhadap total populasi industri besar sedang	-	-	-	0,98	0.69	70.41

Realisasi jumlah unit industri besar sedang yang tumbuh di wilayah Jawa mengalami peningkatan dari 80,34 persen di tahun 2015 menjadi 82,90 persen di tahun 2016, sedangkan di wilayah Bali mengalami penurunan dari 1,47 persen di tahun 2015 menjadi 1,32 persen di

tahun 2016.

Tercapainya target untuk indikator peningkatan jumlah unit industri besar sedang di wilayah Jawa terhadap total populasi industri besar sedang disebabkan oleh faktor-faktor seperti infrastruktur pendukung industri telah memadai, ketersediaan energi gas dan listrik, ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, kemudahan berinvestasi, kemudahan permodalan serta perijinan industri.

Sementara itu, tidak tercapainya target untuk indikator peningkatan jumlah unit industri besar sedang di wilayah Bali dipengaruhi oleh peran sektor industri terhadap PDRB Bali tidak sebesar sektor pariwisata. Pola investasi di Provinsi Bali yang masih didominasi sektor pariwisata menyebabkan Bali tidak memiliki kawasan industri untuk dikembangkan, selain usaha industri pengolahan yang belum cukup efisien peningkatannya dalam beberapa tahun terakhir. Selama tiga tahun terakhir dari tahun 2015, perkembangan IBS di Bali kondisinya semakin menurun. Selain karena faktor eksternal seperti pelemahan ekonomi global dan makin meningkatnya persaingan, IBS di Bali terancam iklim usaha yang belum sepenuhnya membantu keberadaan para pemilik usaha (Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bali, 2015).

**Tabel 6.**  
**Statistik Perusahaan Industri Besar Sedang di Bali Tahun 2010-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perusahaan</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja (Orang)</b>	<b>Nilai Tambah (Juta Rp)</b>
2013	310	22.201	1.547.131
2012	318	21.645	7.125.624
2011	329	25.252	1.359.606
2010	326	27.938	1.185.841

Sumber : Statistik Daerah Provinsi Bali, 2015

Capaian target dari indikator peningkatan jumlah industri besar sedang di wilayah Nusa Tenggara belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,69 persen dari target 0.98 persen yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena peran sektor industri terhadap PDRB di Nusa Tenggara masih jauh di bawah peran sektor pertanian dan jasa.

Provinsi NTB dan NTT memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dalam perekonomian daerah tersebut. Industri yang berkembang di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar pengolahan makanan. Sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sektor

industri pengolahan dalam perekonomian hanya sebesar 1,42 persen, hal ini mengindikasikan ketergantungan NTT terhadap suplai produk olahan dari daerah lain sangat tinggi.

Nusa Tenggara belum memiliki kawasan industri yang akan dikembangkan. Sektor industri di Nusa Tenggara masih didominasi oleh industri kecil dan menengah yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya masih kecil untuk perekonomian. Oleh karena itu perlu peningkatan industri pengolahan berbasis pengembangan sumberdaya alam dengan optimalisasi potensi alam. Dengan berkembangnya sektor industri, aktivitas di sektor-sektor lain akan turut meningkat karena sektor industri membutuhkan pasokan bahan baku baik dari sektor pertanian maupun sektor lainnya, termasuk hasil dari sektor industri itu sendiri.

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III melakukan upaya untuk mendukung peningkatan jumlah industri besar sedang di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara melalui program dan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan pemetaan profil kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kajian pemetaan profil kawasan industri selain bertujuan untuk memperoleh data dan informasi komprehensif, akurat dan terkini mengenai kawasan industri juga menyusun sistem informasi kawasan industri yang dapat digunakan sebagai media promosi investasi di dalam kawasan industri.
2. Penyusunan dokumen kelayakan pembangunan kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pengembangan industri di daerah melalui rencana pembangunan kawasan industri.

**Tabel 7.**

**Target dan Realisasi IKU Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

IKU	2015			2016		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah Jawa	6.97	5.87	84.22	5,63	4.85	86.15
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah Bali	7.80	8.88	113.85	6,25	7.13	114.08
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di wilayah Nusa Tenggara	-	-	-	6.55	3.96	60.46

Target indikator pertumbuhan sektor industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara menurun dibanding tahun 2015 yang diikuti dengan penurunan realisasi peningkatan pertumbuhan sektor industri. Sementara itu capaian untuk indikator meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Bali melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Direktorat PWI III Tahun 2016 yaitu sebesar 7,13 persen.

Penurunan target dan realisasi pertumbuhan sektor industri di wilayah Jawa antara lain dipengaruhi oleh program percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke luar Pulau Jawa serta kebijakan afirmatif pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi I-XIII. Pemerintah berupaya melakukan penyebaran industri karena pembangunan sektor industri dan perekonomian nasional saat ini belum merata ke seluruh wilayah Indonesia. Peranan Pulau Jawa dalam pembentukan PDB sektor industri masih sangat dominan.

Kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah terkait pengembangan sektor industri di luar Pulau Jawa antara lain memperlonggar investasi, memangkas izin, prosedur, waktu dan biaya pengurusan izin investasi di kawasan industri, memberikan insentif kawasan industri, menurunkan harga tarif listrik, menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan KEK, serta insentif pajak untuk industri padat karya.

Tidak tercapainya target peningkatan pertumbuhan sektor industri di Bali dan Nusa Tenggara disebabkan karena masih sangat dominannya sektor pariwisata di wilayah Bali dan industri kecil dan rumah tangga di wilayah Nusa Tenggara. Sektor pariwisata saat ini merupakan penggerak utama perekonomian di Bali, sehingga industri yang sangat berkembang saat ini adalah industri kreatif. Sementara itu, Nusa Tenggara yang didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga yang jumlahnya masih sedikit, menyebabkan kontribusi industri pengolahan tidak dominan dalam perekonomian. Disisi lain, wilayah Nusa Tenggara belum memiliki kawasan industri yang akan dikembangkan.

Perlu dikembangkan industri di kawasan timur Indonesia yang dapat memperkuat struktur ekonomi di wilayah tersebut sekaligus struktur perekonomian nasional dan pemerataan industri yang selama ini terpusat di Pulau Jawa. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III pada tahun 2016 untuk turut meningkatkan pertumbuhan sektor industri adalah melalui program dan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Penyusunan dokumen pola pengembangan sentra IKM di Jawa Barat dan Jawa Tengah.  
Penyusunan dokumen tersebut bertujuan menyusun pola pengembangan sentra IKM yang



bermanfaat dalam mendukung industri besar sehingga dapat meningkatkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan sektor industri, mendukung pemanfaatan sumber daya lokal, serta mendukung pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri.

2. Penyusunan dokumen perencanaan konstruksi (*Detailed Engineering Design*) sentra IKM di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan. Penyusunan dokumen tersebut untuk keperluan pembangunan sentra IKM di beberapa daerah. Selanjutnya dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan sentra IKM. Diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini, akan membantu meningkatkan pertumbuhan industri di daerah sehingga berpengaruh terhadap peningkatan PDRB daerah.
3. Penyusunan dokumen kelayakan pembangunan kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pengembangan industri di daerah melalui rencana pembangunan kawasan industri.
4. Penyusunan kajian identifikasi potensi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dalam kajian tersebut dianalisis mengenai potensi sumber daya di wilayah tersebut hingga rekomendasi pengembangan industrinya.
5. Pelaksanaan kegiatan koordinasi pembangunan sentra IKM di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dengan adanya program Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pembangunan sentra IKM yang dikoordinasi oleh Kementerian Keuangan, Bappenas dan K/L teknis, daerah memiliki peluang untuk membangun dan mengembangkan sentra IKM melalui pembangunan sentra IKM. Dari pembangunan sentra IKM tersebut, diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan industri di daerah yang mampu menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. Kegiatan pembangunan sentra IKM membutuhkan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun pengusaha setempat.

Tabel 8.

**Target dan Realisasi IKU Peningkatan Kontribusi Investasi dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

IKU	2015			2016		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di wilayah Jawa	68.91	69.52	100.89	67.51	68.51	101.48
Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di wilayah Bali dan Nusa Tenggara	0.15	0.89	593.33	0.15	0.15	100

Realisasi untuk indikator kontribusi investasi sektor industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara mampu memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III Tahun 2016. Namun realisasi kontribusi investasi sektor industri tersebut menurun jika dibandingkan pada tahun 2015 yaitu di wilayah Jawa sebesar 69,52 persen pada tahun 2015 menjadi 68,51 persen di tahun 2016, di wilayah Bali sebesar 0,89 persen pada tahun 2015 menjadi 0,15 persen pada tahun 2016. Penurunan nilai kontribusi investasi sektor industri di Pulau Jawa tersebut menunjukkan bahwa kontribusi investasi sektor industri daerah – daerah di luar Pulau Jawa mulai meningkat.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk penyebaran dan pemerataan industri ke luar Pulau Jawa. Pemerintah telah menyusun paket kebijakan ekonomi jilid I-XIII yang bertujuan untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi dengan menyederhanakan prosedur, percepatan waktu pelayanan perizinan dan pengurangan biaya serta penataan perizinan melalui pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelayanan perizinan melalui sistem elektronik (online) serta penegakan hukum dan kepastian usaha menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong kenaikan nilai investasi tersebut.

Sementara itu, pola investasi di Bali masih didominasi oleh sektor pariwisata. Sektor industri pengolahan belum cukup efisien peningkatannya dalam beberapa tahun terakhir, terlebih Bali tidak memiliki kawasan industri untuk dikembangkan.

Jika ditinjau berdasarkan lokasi investasi menurut provinsi, pada triwulan III tahun 2016 untuk PMA, empat dari lima besar lokasi investasi yang diminati terletak di Pulau Jawa. Keempat lokasi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Banten, dengan kontribusi realisasi PMA terbesar yaitu Jawa Barat sebesar 21,1 persen.

**Tabel 9.**  
**Lima Besar Lokasi Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2016**

PMA			PMDN		
Lokasi (Provinsi)	USD Juta	% Thd Total	Lokasi (Provinsi)	Rp. Triliun	% Thd Total
Jawa Barat	1.556,44	21,1	Jawa Timur	14,0	25,2
Jawa Timur	644,01	8,7	Jawa Barat	7,4	13,2
DKI Jakarta	643,39	8,7	Banten	7,1	12,7
Banten	613,84	8,3	DKI Jakarta	3,8	6,9
Kalimantan Timur	586,13	7,9	Sumatera Selatan	3,6	6,4
Gabung lainnya	3.345,67	45,3	Gabung lainnya	19,8	35,5
Jumlah	7.389,48	100,0	Jumlah	55,6	100,0

Sumber : BKPM, diolah

Direktorat Pengembangan Wilayah III telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai investasi di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara melalui program dan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan antara lain penyusunan kajian kinerja layanan infrastruktur dasar kawasan industri di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 2016. Kajian tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing kawasan industri sehingga diharapkan mampu mewujudkan kawasan industri yang memberikan layanan berkualitas dan efisien, mengembangkan rantai nilai perekonomian suatu daerah, menarik jumlah investasi yang lebih besar, berkontribusi bagi pengembangan sektor industri dan mengembangkan ekosistem di dalamnya.

**Tabel 10.**  
**Target dan Realisasi IKU Peningkatan Share Sektor Industri dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

IKU	2015			2016		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Jawa	25.35	29.09	114.75	26.05	31.00	119.00
Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Bali	8.85	6.38	72.09	9.10	7.0	76.92
Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Nusa Tenggara	-	-	-	2.98	3	100.67

Realisasi dari indikator meningkatnya *share* sektor industri terhadap total PDRB di wilayah Jawa dan Bali mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2015. Namun, realisasi di wilayah Bali tersebut belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III Tahun 2016.

Analisis *share* sektor industri bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas sektor industri terhadap perekonomian di daerah tersebut. Nilai *share* sektor industri khususnya industri pengolahan nonmigas di wilayah Jawa masih menjadi yang terbesar dibanding dengan lapangan usaha lain terhadap nilai PDRB. Ini menjadi bukti pentingnya peranan sektor industri sebagai penggerak perekonomian di Jawa. Sektor ini tidak saja berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam menunjang pembentukan daya saing nasional. Selama dua dasawarsa sebelum krisis ekonomi, peran sektor industri terhadap perekonomian nasional mencapai 25 persen.

Sektor pariwisata saat ini merupakan penggerak utama perekonomian di Bali sementara peran sektor industri pada pembentukan PDRB di Bali tidak begitu besar. Pola investasi di Bali masih didominasi sektor pariwisata sehingga Bali tidak memiliki kawasan industri untuk dikembangkan, selain usaha industri pengolahan yang belum cukup efisien peningkatannya dalam beberapa tahun terakhir.

Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III untuk turut meningkatkan *share* sektor industri terhadap PDRB di daerah adalah melalui program dan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan yang mendorong pertumbuhan industri di daerah, antara lain :

1. Penyusunan dokumen pola pengembangan sentra IKM di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Penyusunan dokumen tersebut bertujuan menyusun pola pengembangan sentra IKM yang bermanfaat dalam mendukung industri besar sehingga dapat meningkatkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja, mendukung pemanfaatan sumber daya lokal, serta mendukung perkembangan wilayah pusat pertumbuhan industri.
2. Penyusunan dokumen perencanaan konstruksi (*Detailed Engineering Design*) sentra IKM di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan. Penyusunan dokumen tersebut untuk keperluan pembangunan sentra IKM di beberapa daerah. Selanjutnya dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan sentra IKM. Diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini, akan membantu meningkatkan pertumbuhan industri di daerah

sehingga berpengaruh terhadap peningkatan PDRB daerah.

3. Pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Jawa. Strategi pembangunan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan WPPI yang berbasis keunggulan yang dimiliki daerah diantaranya potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia industri, potensi sumber daya teknologi dan inovasi. Untuk meningkatkan kinerja berbagai pusat-pusat pertumbuhan industri maka diperlukan penguatan infrastruktur dan konektivitas.
4. Pelaksanaan kegiatan koordinasi pembangunan sentra IKM di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Seiring dengan pengembangan kawasan industri di beberapa daerah, pengembangan sentra IKM dinilai akan dapat membantu menungjung kegiatan industri pengolahan dalam skala kecil dan menengah. Dengan adanya program Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pembangunan sentra IKM yang dikoordinasi oleh Kementerian Keuangan, Bappenas dan K/L teknis, daerah memiliki peluang untuk membangun dan mengembangkan sentra IKM melalui pembangunan sentra IKM. Dari pembangunan sentra IKM tersebut, diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan industri di daerah yang mampu menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. Kegiatan pembangunan sentra IKM membutuhkan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pengusaha di daerah.

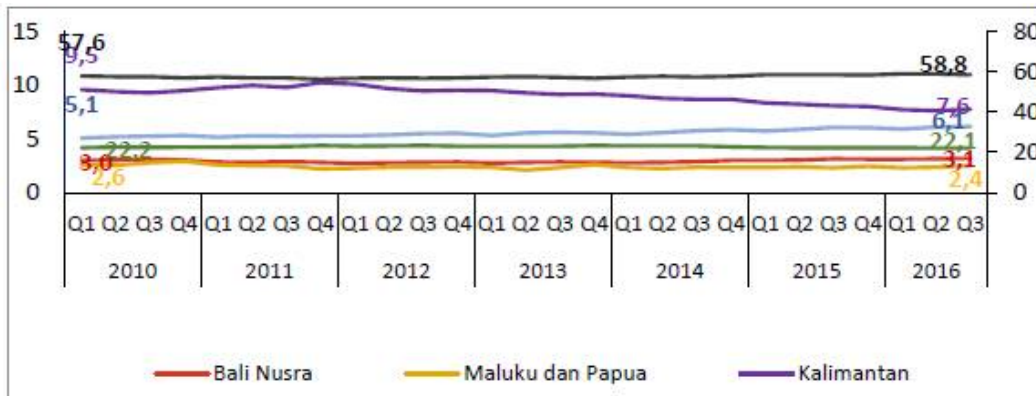
Secara umum terjadi peningkatan capaian target dari beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk sasaran peningkatan penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan perekonomian Indonesia yang tumbuh sebesar 5,0 persen (YoY) dibanding pada triwulan III tahun 2015 yang sebesar 4,7 persen (YoY).

Secara spasial, seluruh pulau/wilayah di Indonesia mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Maluku dan Papua. Rata-rata pertumbuhan di Maluku dan Papua, Sulawesi, Jawa serta Bali dan Nusa Tenggara lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa adalah sebesar 5,6 persen (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III tahun 2015 yang sebesar 5,5 persen (YoY). Sementara itu, di Bali dan Nusa Tenggara pada triwulan III tahun 2016 adalah sebesar 5,0 persen (YoY), menurun dibandingkan triwulan III tahun 2015 yang sebesar 14,1 persen (YoY).

Perkembangan kontribusi daerah terhadap PDB dari tahun ke tahun relatif tidak banyak

berubah. Kontribusi terbesar terhadap PDB dari triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan III 2016 masih didominasi pulau Jawa, yaitu sebesar 58,4 persen. Sedangkan kontribusi wilayah Bali terhadap PDB sebesar 3,2 persen dan wilayah Nusa Tenggara sebesar 2,5 persen pada triwulan II tahun 2016.

**Gambar 2.**  
**Kontribusi Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara terhadap PDB pada Triwulan I Tahun 2010 – Triwulan III Tahun 2016**

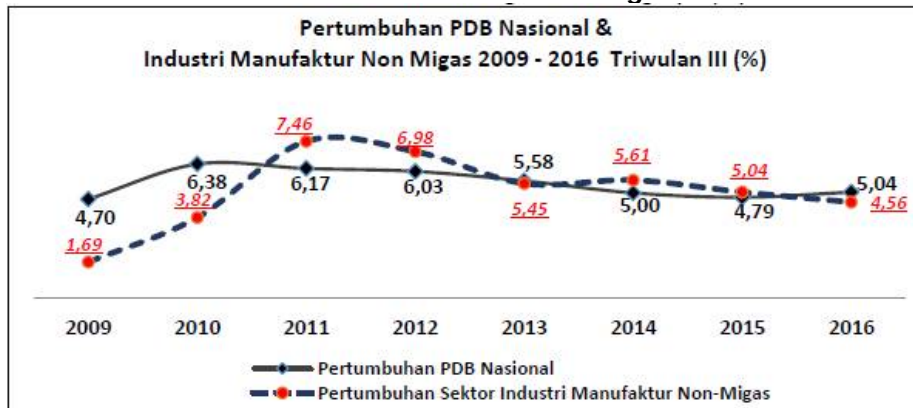


Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada triwulan III tahun 2016, Jawa Barat dan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa, yaitu masing-masing sebesar 5,8 persen (YoY). Bali merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yaitu dengan pertumbuhan sebesar 6,2 persen (YoY).

Nilai kontribusi industri pengolahan khususnya industri pengolahan nonmigas yang selalu terbesar dibanding dengan lapangan usaha lain, ini menjadi bukti pentingnya peranan sektor industri sebagai penggerak perekonomian nasional. Sektor ini tidak saja berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam menunjang pembentukan daya saing nasional. Selama dua dasawarsa sebelum krisis ekonomi, peran sektor industri terhadap perekonomian nasional mencapai 25 persen.

**Gambar 3.**  
**Pertumbuhan PDB Nasional Industri Manufaktur Non Migas 2009-2016 Triwulan III (%)**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada Triwulan III tahun 2016, PDB industri pengolahan non migas atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 1.681 triliun dan tumbuh sebesar 4,56 persen. Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas tersebut masih didorong oleh industri yang berbasis konsumsi dalam negeri.

#### **b. Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III dalam rangka tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara diukur melalui indikator kinerja sasaran strategis, yaitu :

- 1). Tersusunnya kajian pengembangan WPPI, diukur melalui jumlah dokumen kajian pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri.
- 2). Terlaksananya review Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, diukur melalui banyaknya daerah yang direview kawasan peruntukan industrinya.

**Tabel 11.**  
**Target dan Realisasi IKSS dari Tumbuh dan Berkembangnya Wilayah Pusat  
 Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

Sasaran	NO	IKSS	2015			2016		
			T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	1	Tersusunnya kajian pengembangan WPPI	4 Prov	4 Prov	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
	2	Terlaksananya review kawasan peruntukan industri di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	-	-	-	26 daerah	31 daerah	119.23

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan tentang Perwilayahan Industri untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah NKRI. Penyebaran pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi didukung oleh struktur industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dalam kerangka menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Mengingat daya dukung pulau Jawa yang terbatas, serta potensi peran industri sebagai motor penggerak ekonomi, maka penyebaran dan pemerataan pembangunan industri merupakan agenda penting dalam mewujudkan struktur ekonomi nasional yang kokoh dan seimbang. Sejalan dengan amanat Undang-undang di atas, Kementerian Perindustrian akan terus berupaya untuk melakukan pemerataan dan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk Pulau Jawa dimana sebagian besar aktivitas sektor industri nasional berlokasi, maka perlu dilakukan penataan agar industri di Pulau Jawa tetap dapat berdaya saing dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang ada.

Per-wilayahan Industri yang dilaksanakan melalui : pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI), dan pengembangan Sentra Industri kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) merupakan wilayah yang dirancang



dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat.

Pada tahun 2016, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III memiliki sasaran program/kegiatan berupa tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, yang memiliki indikator kinerja utama (IKU 1) berupa tersusunnya kajian pengembangan WPPI di beberapa daerah, program/kegiatan yang mendukung sasaran tersebut yaitu :

### **1. Identifikasi Potensi Pengembangan WPPI di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur**

Dalam pembangunan dan pengembangan industri, perlu memperhatikan penyediaan infrastruktur pendukung, penggunaan ruang untuk kegiatan produksi/jasa juga memprediksi arah konsentrasi kegiatan dan memperkirakan kebutuhan fasilitas serta rencana jaringan penghubung. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur adalah wilayah yang memiliki potensi namun belum dikembangkan secara optimal sehingga perlu diidentifikasi potensi pengembangannya.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kajian yang meliputi analisa spasial dan tata ruang, analisa kebutuhan infrastruktur dan sarana pendukung pengembangan WPPI, analisa sektor industri, analisa sistem logistik, analisa kebijakan publik, analisa ekologi dan analisa perencanaan strategis dan rencana aksi untuk mendukung implementasi pengembangan WPPI. Adapun output yang dihasilkan dari kajian identifikasi pengembangan WPPI Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur berisi :

- Potensi ekonomi dan industri unggulan sebagai sektor penggerak di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (daya dukung lingkungan, ekonomi wilayah, sosial budaya, potensi sektor ekonomi dan industri unggulan di wilayah studi);
- Rencana pengembangan dan penyediaan kebutuhan infrastruktur baik fisik maupun non fisik dalam pengembangan WPPI Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (transportasi/logistik, sarana pendukung (air, listrik, energi, telekomunikasi) dan sumber daya manusia).
- Rencana strategis pengembangan sektor ekonomi dan industri Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kebijakan, strategi dan program pengembangan)
- Rekomendasi kesesuaian wilayah studi menjadi WPPI (arahan pemanfaatan kawasan)

peruntukan industri, kawasan industri dan sentra IKM).

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen kajian yang telah disusun kepada stakeholder di daerah dan perlu koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait.

## **2. Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur WPPI di Jawa Barat**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun kajian kebutuhan infrastruktur air, energi, sumber daya manusia, teknologi, transportasi dan logistik dalam WPPI di Jawa Barat. Jawa Barat memiliki 2 WPPI, yaitu Jawa Barat bagian barat (Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang) dan Jawa Barat bagian timur (Cirebon-Indramayu-Majalengka). Industri yang berperan besar dalam WPPI di Jawa Barat adalah industri pengolahan. Sektor yang berpengaruh besar dalam memberikan kontribusi adalah industri produk logam, komputer, elektronik, optik dan peralatan listrik.

Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) yang dilaksanakan melalui desk study, survey, pengumpulan data dan informasi terkait WPPI, pemetaan data dan informasi kebutuhan infrastruktur air, energi, sumber daya manusia, teknologi, transportasi dan logistik yang mendukung pengembangan sumber daya industri dalam WPPI; FGD atau rapat teknis dalam rangka mendapatkan masukan dari para stakeholder terkait penyusunan rencana pengembangan infrastruktur; serta penyusunan strategi dan rekomendasi pengembangan infrastruktur dalam WPPI (rencana strategis, rekomendasi kebijakan, program, rencana aksi). Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua sub kegiatan, yaitu :

- a. Kajian Kebutuhan Infrastruktur Air, Energi, SDM dan Teknologi dalam WPPI di Jawa Barat; dan
- b. Kajian Kebutuhan Transportasi dan Logistik dalam WPPI di Jawa Barat.

Keluaran (output) dari kegiatan kajian kebutuhan infrastruktur dalam WPPI yang berisi:

- Rencana pengembangan infrastruktur air, energi, SDM dan Teknologi dalam WPPI di Jawa Barat
- Rencana pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik dalam WPPI di Jawa Barat;

- Rencana Aksi Pengembangan infrastruktur air, energi, SDM dan Teknologi dalam WPPI di Jawa Barat ;
- Rencana Aksi Pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik dalam WPPI di Jawa Barat ;

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen kajian yang telah disusun kepada stakeholder di daerah dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam pengembangan infrastruktur dalam WPPI di Jawa Barat.

## **2. Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur WPPI di Jawa Timur**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun kajian kebutuhan infrastruktur air, energi, sumber daya manusia, teknologi, transportasi dan logistik dalam WPPI di Jawa Timur. WPPI di Jawa Timur berada di daerah Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan. Industri yang berperan besar dalam WPPI di Jawa Timur adalah industri pengolahan. Sektor yang berpengaruh besar dalam memberikan kontribusi adalah industri makanan dan minuman.

Keluaran (output) dari kegiatan kajian kebutuhan infrastruktur dalam WPPI di Jawa Timur yang berisi :

- Rencana pengembangan infrastruktur air, energi, SDM dan Teknologi dalam WPPI di Jawa Timur;
- Rencana pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik dalam WPPI di Jawa Timur;
- Rencana Aksi Pengembangan infrastruktur air, energi, SDM dan Teknologi dalam WPPI di Jawa Timur;
- Rencana Aksi Pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik dalam WPPI di Jawa Timur;

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen kajian yang telah disusun kepada stakeholder di daerah dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam pengembangan infrastruktur dalam WPPI di Jawa Timur.

### 3. Sosialisasi dan Koordinasi Pengembangan WPPI di Jawa

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Jawa, dengan melaksanakan koordinasi pengembangan WPPI di Jawa untuk mempercepat implementasi master plan WPPI dan dukungan dari stakeholder terkait serta tersusunnya pedoman teknis KPI.

IKSS ke-2 dari berkembangnya WPPI di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara adalah terlaksananya review KPI di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 14 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yaitu pengembangan Perwilayahan Industri yang dilaksanakan salah satunya melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Kawasan peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam kawasan peruntukan industri dapat dibangun kawasan industri, sentra industri kecil dan menengah, dan industri jika di kawasan tersebut belum memiliki kawasan industri. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kawasan peruntukan industri merupakan media atau wadah pembangunan dan pengembangan industri di suatu wilayah.

Kawasan peruntukan industri ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai salah satu bentuk kawasan budidaya. Penetapan kawasan peruntukan industri tersebut dilakukan melalui berbagai analisis termasuk analisis kesesuaian lahan. Dalam hal ini, Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya Kabupaten dan Kota ditetapkan untuk jangka waktu 25 tahun dan ditinjau kembali setiap lima tahun. Review tersebut dilakukan dengan melihat perkembangan dan dinamika suatu daerah serta perubahan lingkungan eksternal baik dari aspek kebijakan dan peraturan perundangan nasional atau provinsi, ataupun dinamika dari aspek-aspek lainnya seperti ekonomi, social, budaya dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III melakukan mereview kawasan peruntukan industri dengan harapan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Program/kegiatan yang mendukung target IKSS ke-2 dari berkembangnya WPPI di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yaitu :

- a. Review Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Banten, D.I.Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah; dan
- b. Review Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan mampu memberikan arahan dalam pengembangan kawasan peruntukan industri sehingga mampu menjadi sarana bagi aktivitas industri yang efektif, efisien dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Review KPI yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III diutamakan untuk Kab./Kota yang termasuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) atau Kab.Kota yang Perda RTRW-nya akan direview. Review KPI yang dilaksanakan oleh Direktorat PWI III tahun 2016 dilaksanakan di daerah antara lain :

**Tabel 12.**  
**Data Review KPI Direktorat Pengembangan Wilayah III Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kab.Kota</b>
1	Banten	Kab. Lebak Kab. Tangerang Kab. Serang
2	D.I Yogyakarta	Kab. Sleman Kab. Kulonprogo Kab. Bantul
3	Jawa Barat	Kab. Bekasi Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Indramayu Kab. Cirebon
4	Jawa Tengah	Kota Semarang Kab. Semarang Kab. Demak Kab. Kendal Kab. Grobogan
5	Jawa Timur	Kab. Pasuruan Kab. Sidoarjo Kab. Gresik Kab. Tuban

		Kab. Lamongan
6	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram Kab. Lombok Timur Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Utara
7	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Malaka

Keluaran (output) dari kegiatan review KPI tersebut berisi rekomendasi dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan KPI ditinjau dari karakteristik wilayah studi, kesesuaian KPI dengan pedoman KPI dan pedoman pembangunan KI, aksesibilitas/jaringan infrastruktur dan transportasi, daya dukung lingkungan, analisis industri potensial, serta isu-isu permasalahan yang menjadi hambatan.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen kajian yang telah disusun kepada stakeholder terkait.

### c. Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III dalam rangka tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara diukur melalui indikator kinerja utama, yaitu terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan, diukur melalui banyaknya kawasan industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang difasilitasi pengembangan kawasan industrinya.

**Tabel 13.**  
**Target dan Realisasi IKSS dari Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

Sasaran Program/Kegiatan	IKSS	2015			2016		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Tumbuh dan berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	Terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan	2 KI	2 KI	100	3 KI	3 KI	100

Dalam pengembangan perwilayahan industri sebagaimana pada pasal 14 dari Undang-undang No. 3 Tahun 2014 disebutkan peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Perwilayahan industri dimaksud dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.

Pada tahun 2016, Direktorat Pengembangan Perwilayahan Wilayah Industri III melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri di beberapa daerah, yaitu:

#### **1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri di Jawa Barat dan Jawa Timur**

Sesuai dengan amanat undang-undang, setiap perusahaan industri baru wajib masuk ke dalam kawasan industri dengan pertimbangan agar industri yang dibangun berada dalam tata ruang yang tepat dan benar, ramah lingkungan, pengelolaan yang efektif dan efisien serta memudahkan dalam perencanaan dan pengadaan infrastruktur pendukung. Adapun dampak yang diharapkan dalam pembangunan kawasan industri antara lain memberikan kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kavling industri siap bangun yang sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, memberikan kepastian hukum lokasi tempat

usaha sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa aman bagi dunia usaha, dan mengatasi permasalahan tata ruang sekaligus mengendalikan masalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri. Implementasi kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sub kegiatan :

1. Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Industri di Kabupaten Garut dan Kabupaten Indramayu;
2. Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Industri di Kabupaten Madiun

Keluaran (output) dari kegiatan perencanaan pembangunan kawasan ini berupa Dokumen pra FS pembangunan kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen kajian yang telah disusun kepada stakeholder terkait.

## **2. Penyusunan Pemetaan Profil Kawasan Industri di Wilayah III**

Kawasan industri di Indonesia berkembang sekitar awal tahun 1970an yang merupakan inisiasi dari pemerintah pusat. Di tahun 1990an, pemerintah membuka pintu investasi di kawasan industri untuk sector swasta dan sejak saat itu kawasan industri bermunculan satu persatu dan tumbuh dengan pesat. Saat krisis ekonomi akhir 1990an, banyak kawasan industri yang mati suri, kawasan industri tersebut mulai hidup lagi di pertengahan tahun 2000an seiring dengan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi.

Dengan pesatnya pertumbuhan kawasan industri saat ini, data dan informasi fasilitas industri yang diberikan kepada masyarakat dan stakeholder ini seharusnya selalu update. Pada tahun 2016 Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III melakukan pemetaan profil kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Timur untuk mendapatkan data dan informasi secara berkala dari pengelola kawasan industri terkait isu pengembangan kawasan industri, kebijakan pengembangan kawasan industri di wilayah studi, peta dasar, peta fisik, peta persebaran kawasan industri, peta infrastruktur pendukung dan peta rencana tata ruang wilayah di wilayah studi.

Keluaran (output) dari kegiatan pemetaan profil kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Timur ini, berupa :



- Data dan informasi akurat mengenai kawasan-kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Timur;
- Data peta kondisi dan kemampuan kawasan-kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Timur;
- Sistem informasi berupa website, video profil dan media interaktif mengenai profil kawasan industri yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan data dan informasi yang telah disusun kepada stakeholder terkait serta hasil kegiatan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kawasan industri secara terintegritas dan komprehensif.

### **3. Optimalisasi Kinerja Layanan Kawasan Industri di Jawa**

Kawasan industri di Indonesia berkembang sekitar awal tahun 1970an yang merupakan inisiasi dari pemerintah pusat. Di tahun 1990an, pemerintah membuka pintu investasi di kawasan industri untuk sector swasta dan sejak saat itu kawasan industri bermunculan satu persatu dan tumbuh dengan pesat. Saat krisis ekonomi akhir 1990an, banyak kawasan industri yang mati suri, kawasan industri tersebut mulai hidup lagi di pertengahan tahun 2000an seiring dengan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi.

Dalam kurun waktu 20 tahun, Kawasan Industri telah tumbuh di 12 Provinsi dengan jumlah 74 Kawasan Industri dengan luas 30.038 hektar yang sudah operasional dan masih banyak lagi yang sedang mempersiapkan pembangunan Kawasan Industri terutama diarahkan di luar Jawa. Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian diharapkan dapat menjangkau dan menilik kebutuhan peran pelaku pengelola kawasan industri sehingga mendorong tingkat hunian (occupancy rate) kawasan industri itu sendiri dan keberlanjutan usahanya. Pada sisi pemerintah pusat dan daerah dititik beratkan pada komitmen mereka dalam rangka (1) mewujudkan peluang yang disediakan kawasan industri sehingga menjadi kenyataan, (2) mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, dan (3) memenuhi/melengkapi berbagai prakondisi yang dibutuhkan bagi pengembangan kawasan industri yang berdaya saing.

Pada tahun anggaran 2016 Direktorat PWI III melakukan fasilitasi optimilasi kinerja layanan kawasan industri di Jawa untuk mendorong pertumbuhan industri dan

meningkatkan daya saing kawasan industri eksisting. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bantuan jasa konsultan melalui desk studi, wawancara terkait perencanaan kebutuhan infrastruktur dasar kawasan industri yang meliputi konsep pengelolaan limbah cair (WWTP) dan pra FS pengolahan air baku (WTP), manajemen pemeliharaan jalan utama dan lingkungan kawasan industri serta saluran drainasenya; dan kebijakan daerah terkait perijinan dan tata ruang wilayah.

Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keluaran dari kegiatan ini berupa kajian kinerja layanan infrastruktur dasar kawasan industri di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan data dan informasi yang telah disusun kepada stakeholder terkait serta sebagai acuan dalam penyusunan program pengembangan kawasan industri lebih lanjut.

#### **4. Kaji Tindak dan Penyelesaian Permasalahan Pengembangan Perwilayahan Industri di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

Sebagaimana amanat tugas, pokok, dan fungsi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III serta untuk upaya penanganan, koordinasi, dan antisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul atau yang akan muncul dalam Pengembangan WPPI, KPI, KI, dan Sentra IKM di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Direktorat PWI III memfasilitasi kegiatan Kaji Tindak dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perwilayahan Industri dengan tujuan:

- Menyelesaikan permasalahan dan potensi permasalahan terkait Pengembangan WPPI, KPI, KI, dan Sentra IKM;
- Melakukan koordinasi dengan instansi stakeholder terkait di pusat dan daerah;
- Melakukan evaluasi dan monitoring terkait Pengembangan WPPI, KPI, KI, dan Sentra IKM;

Kegiatan ini diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan potensi permasalahan terkait Perwilayahan Industri. Kegiatan ini dilaksanakan antara lain dengan melaksanakan benchmarking dan promosi investasi ke luar negeri serta melakukan identifikasi dan analisis permasalahan pengembangan WPPI, KPI, KI dan Sentra IKM.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar, namun pelaksanaan bench marking dan promosi investasi tidak dapat dilaksanakan karena pemblokiran. Ke depan perlu diambil tindak lanjut untuk memperbaiki dan mengatasi permasalahan pengembangan perwilayahan industri.

**d. Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III dalam rangka tumbuhnya sentra industri kecil dan menengah (SIKM) di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang diukur melalui indikator :

- 1) Terfasilitasinya sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan, diukur melalui banyaknya sentra IKM yang dikaji perencanaan pembangunannya di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
- 2) Terbangunnya sentra IKM di wilayah III, diukur melalui banyaknya sentra IKM yang dibangun di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

**Tabel 14.**  
**Target dan Realisasi IKSS dari Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

Sasaran Program/Kegiatan	IKSS	2015			2016		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKM) di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	1	2	2	100	4	4	100
	2	-	-	-	1	0	0

Dalam pengembangan perwilayahan industri sebagaimana pada pasal 14 dari Undang-undang No. 3 Tahun 2014 disebutkan peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya melalui pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.

Peran industri kecil dan menengah dalam pembangunan industri nasional sangat besar dan penyebarannya hampir merata disemua daerah, namun sebagian besar kegiatan industrinya belum tersentralisasi di satu lokasi. Hal ini antara lain berdampak kepada timbulnya masalah lingkungan dan terbatasnya dukungan infrastruktur. Sehingga Pada tahun 2016, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III memfasilitasi Perencanaan Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diharapkan dapat menjadi sentra yang bermanfaat dan berdaya saing.

Pada tahun 2016, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III melakukan fasilitasi sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan di beberapa daerah, yaitu :

#### **1. Penyusunan DED Sentra IKM di Kabupaten Pamekasan dan Bangkalan**

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2014 untuk melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama. Pengembangan Sentra IKM dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan Sentra IKM.

Keluaran (output) dari penyusunan DED sentra IKM di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan, berupa :

- Dokumen *Detailed Engineering Design* (DED) sentra IKM di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan yang berisi konsep perencanaan, sketsa gagasan, program ruang, organisasi hubungan ruang, informasi terkait penyelidikan tanah sederhana, keterangan

rencana kota, petunjuk desain fisik yang memuat petunjuk dan bentuk arsitektur, motif desain, detail jalan dan perkerasan, desain dasar pekerjaan drainase, desain dasar pekerjaan air limbah, desain dasar air baku, desain pekerjaan lanscape, listrik, bangunan dan arsitektur, dokumen/album gambar (Bestek) yang memuat gambar rancangan, detail rancangan serta gambar konstruksi.

- Dokumen lelang pekerjaan konstruksi sentra IKM yang memuat tentang rencana anggaran biaya (RAB/estimasi biaya), rincian volume pelaksanaan pekerjaan (BQ/Bill of Quantity), serta rencana kerja dan syarat-syarat (RKS/spesifikasi).

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen DED sentra IKM yang telah disusun kepada stakeholder terkait sebagai acuan dalam pembangunan sentra IKM di daerah.

## **2. Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Jawa Tengah dan Jawa Barat**

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2014 untuk melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun model pola pengembangan sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Indramayu dan Kota Surakarta yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pembangunan sentra IKM sehingga mendorong terwujudnya pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah yang diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing industri di daerah.

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen pola pengembangan sentra IKM yang telah disusun kepada stakeholder di daerah serta penyusunan DED (*Detailed Engineering Design*) pembangunan sentra IKM di wilayah tersebut.

Capaian IKSS ke-2 untuk tumbuh dan berkembangnya sentra IKM di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dilaksanakan melalui program, kebijakan dan pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah yaitu :

### **1. Pembangunan sentra IKM di Kab. Sumbawa**

Pada saat ini Sentra IKM umumnya tumbuh secara informal dengan berbagai keterbatasannya, tanpa sentuhan dan campur tangan langsung pemerintah sehingga sangat sulit untuk berkembang. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.

Kab. Sumbawa merupakan daerah tertinggal yang mempunyai potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk pertumbuhan IKM. Dokumen perencanaan pembangunan Sentra IKM (DED) telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri pada tahun 2015 Untuk itu sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, pada tahun 2016 Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III akan dilakukan fasilitasi pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah (Sentra IKM) melalui pembangunan sentra IKM dan sarananya di Kabupaten Sumbawa. Melalui kegiatan ini diharapkan akan terbangun lokasi dan tempat produksi yang tertata baik sehingga IKM mampu secara efisien dan efektif dalam menghasilkan produk-produk IKM yang berdaya saing.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 mengenai Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, maka kegiatan pembangunan fisik gedung dan sarana prasarana Sentra IKM di Kabupaten Sumbawa tidak dapat dilaksanakan dikarenakan termasuk di dalam pemotongan anggaran tersebut, namun direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2017.

### **2. Koordinasi Pembangunan Sentra IKM di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

Salah satu upaya pengembangan sentra IKM adalah melalui pembangunan Sentra IKM. Pembangunan sentra IKM dapat dilakukan melalui APBN atau APBD atau dibiayai melalui mekanisme transfer daerah yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengembangan Sentra

Industri Kecil dan Industri Menengah juga membutuhkan koordinasi yang baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pengusaha setempat. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan kegiatan koordinasi pengembangan sentra IKM untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan sentra IKM mengingat dalam pengembangan sentra IKM memerlukan berbagai dukungan beberapa sektor seperti dukungan penyediaan transportasi baik dari dan menuju sentra IKM, dukungan pemenuhan sumber energi baik, dukungan pemenuhan kebutuhan air baik untuk arr proses maupun air untuk konsumsi, dukungan perijinan pendirian sentra IKM dan berbagai dukungan lainnya. Tingkat keberhasilan pembangunan Sentra IKM akan ditentukan seberapa besar penerimaan dan dukungan instansi terkait terhadap rencana pengembangan sentra industri di daerah. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan koordinasi pengembangan sentra-sentra industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan sentra tersebut.

Koordinasi Pengembangan Sentra IKM dimaksudkan untuk melakukan koordinasi pengembangan sentra IKM pada daerah yang akan mengembangkan IKM melalui pembangunan yang bertujuan untuk mempercepat implementasi pembangunan sentra IKM dalam sautu lokasi yang terintegrasi berdasarkan kompetensi inti industri daerah atau

Kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan stakeholder terkait di daerah dalam rangka rencana pembangunan sentra IKM serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK pembangunan sentra IKM tahun 2016. Secara umum pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

**e. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III dalam rangka meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang diukur melalui indikator :

- 1) Jumlah sentra IKM yang dibangun dan beroperasi, diukur melalui banyaknya jumlah sentra IKM yang dibangun dan beroperasi di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

**Tabel 15.**  
**Target dan Realisasi IKSS dari Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Industri di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara**

Sasaran Program/Kegiatan	IKSS		2015			2016		
			T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	1	Jumlah sentra IKM yang dibangun dan beroperasi	-	-	-	1 Sentra	0 Sentra	0

Dalam pengembangan perwilayahan industri sebagaimana pada pasal 14 dari Undang-undang No. 3 Tahun 2014 disebutkan peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya melalui pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.

Peran industri kecil dan menengah dalam pembangunan industri nasional sangat besar dan penyebarannya hampir merata disemua daerah, namun sebagian besar kegiatan industrinya belum tersentralisasi di satu lokasi. Hal ini antara lain berdampak kepada timbulnya masalah lingkungan dan terbatasnya dukungan infrastruktur. Sehingga Pada tahun 2016, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III memfasilitasi Perencanaan Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diharapkan dapat menjadi sentra yang bermanfaat dan berdaya saing.

Pada tahun 2016, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III melakukan fasilitasi sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan di beberapa daerah, yaitu :

#### **1. Pembangunan sentra IKM di Kab. Sumbawa**

Pada saat ini Sentra IKM umumnya tumbuh secara informal dengan berbagai keterbatasannya, tanpa sentuhan dan campur tangan langsung pemerintah sehingga sangat sulit untuk berkembang. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing,



berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.

Kab. Sumbawa merupakan daerah tertinggal yang mempunyai potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk pertumbuhan IKM. Dokumen perencanaan pembangunan Sentra IKM (DED) telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri pada tahun 2015 Untuk itu sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, pada tahun 2016 Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III akan dilakukan fasilitasi pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah (Sentra IKM) melalui pembangunan sentra IKM dan sarananya di Kabupaten Sumbawa. Melalui kegiatan ini diharapkan akan terbangun lokasi dan tempat produksi yang tertata baik sehingga IKM mampu secara efisien dan efektif dalam menghasilkan produk-produk IKM yang berdaya saing.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 mengenai Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, maka kegiatan pembangunan fisik gedung dan sarana prasarana Sentra IKM di Kabupaten Sumbawa tidak dapat dilaksanakan dikarenakan termasuk di dalam pemotongan anggaran tersebut, namun direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2017.

## **2. Kinerja Keuangan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III**

Anggaran DIPA yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III untuk tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 38.850.000.000,-. Pada awal tahun 2016, anggaran tersebut terkena pemotongan anggaran sehingga menjadi Rp. 36.759.386.000,-. Kemudian, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 pada Bulan September 2016, total dana tersebut kembali terkena pemotongan anggaran sehingga menjadi Rp. 19.819.531.270 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 19.746.314.517,- (99,6%) sampai akhir tahun 2016.

Berdasarkan Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan, rata-rata nilai capaian kinerja adalah sebesar 91,82 %. Nilai capaian tersebut telah menunjukkan bahwa program kerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan capaian

IKU yang ditargetkan, namun masih ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pemotongan anggaran.

Untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung sasaran yang telah ditetapkan dan pelayanan bagi *stakeholder* terkait, perlu kiranya dilakukan perbaikan terutama melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III.

Realisasi DIPA sampai dengan 31 Desember 2016 berdasarkan program kerja dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15.

## Pagu Anggaran &amp; Realisasi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III Tahun 2016

No.	Kode Kegiatan	Nama	Pagu (Rp.)	Pagu (Rp.) *tanpa blokir	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Capaian (%) *tanpa blokir
1.	1853.013.051	Identifikasi Potensi Pengembangan Wilayah Industri di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	2.212.700.000	1.858.748.700	1.858.004.200	83,97	99,96
2.	1853.013.052	Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur dalam WPPI di Jawa Barat	1.889.480.000	1.447.059.000	1.446.450.000	76,55	99,96
3.	1853.013.053	Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur dalam WPPI di Jawa Timur	2.239.720.000	1.705.424.800	1.700.184.200	75,91	99,69
4.	1853.013.054	Sosialisasi dan Koordinasi Pengembangan WPPI di Jawa	908.920.000	287.142.600	283.216.000	31,16	98,63
5.	1853.014.051	Review Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Banten, D.I.Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah	3.806.318.000	2.945.238.700	2.942.939.200	77,32	99,92
6.	1853.014.052	Review Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	4.481.878.000	3.412.475.000	3.402.589.500	75,92	99,71
7.	1853.015.051	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri di Jawa Barat dan Jawa Timur	2.905.550.000	2.404.278.700	2.399.476.100	82,58	99,80
8.	1853.015.052	Penyusunan Pemetaan Profil Kawasan Industri di Wilayah III	1.426.800.000	1.157.988.000	1.152.522.613	80,78	99,53
9.	1853.016.051	Penyusunan DED Sentra IKM di Kabupaten Pamekasan dan Bangkalan	1.462.200.000	978.459.400	966.307.100	66,09	98,76
10.	1853.016.052	Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Jawa Tengah dan Jawa Barat	1.560.800.000	1.222.196.100	1.218.448.300	78,07	99,69

11.	1853.017.051	Pembangunan Sentra IKM di Kabupaten Sumbawa	10.389.802.000	330.557.400	319.737.000	3.08	96,73
12.	1853.017.052	Koordinasi Pembangunan Sentra IKM di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	603.200.000	293.211.460	291.562.900	48.34	99,44
13.	1853.018.051	Optimalisasi Kinerja Layanan Kawasan Industri di Jawa	967.600.000	713.932.085	706.588.885	73.02	98,97
14.	1853.018.052	Kaji Tindak dan Penyelesaian Permasalahan Pengembangan Perwilayahan Industri di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	909.400.000	350.985.965	349.74.959	38.46	99,65
15.	1853.019.051	Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Wilayah Industri III	500.000.000	372.495.100	371.979.000	74.40	99,86
16.	1853.019.052	Layanan Manajemen Kinerja	495.000.000	339.338.260	336.568.560	67.99	99,18
		Total	36.759.368.000	19.819.531.270	19.746.314.517	66.64	99,6

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III secara garis besar telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III tahun 2016. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III Tahun 2016. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi penyerapan DIPA tahun anggaran 2016 Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III untuk tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 36.759.368.000,-. Namun karena pemotongan anggaran sehingga menjadi Rp. 19.819.531.270 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 19.746.314.517,- (99,6%) dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 kegiatan.
2. Berdasarkan Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III, memberikan hasil rata-rata sebesar 71,82%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III sudah baik dan cukup efisien karena outputnya tercapai sesuai dengan target, namun ada kegiatan yang tidak mencapai output dikarenakan pemotongan anggaran.
3. Capaian kinerja keuangan Direktorat PWI III tahun 2016 lebih baik dibanding capaian kinerja keuangan pada tahun 2015 yaitu sebesar 87,24%. Sedangkan capaian kinerja sasaran perjanjian Direktorat PWI III tahun 2016 lebih rendah dibandingkan capaian kinerja sasaran perjanjian tahun 2015 yaitu sebesar 106,36%. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran Direktorat PWI III pada tahun 2016 yang mencapai 48,9% dari total anggaran.

#### B. Saran

1. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
2. Diperlukan peningkatan disiplin dan tata kerja dari seluruh staf pelaksana Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III secara lebih profesional.